



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI
PADA 60 (ENAM PULUH) SATUAN KERJA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan sebanyak 60 (enam puluh) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai satuan/unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. bahwa terhadap 60 (enam puluh) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung tersebut telah dilakukan rangkaian evaluasi terhadap proses dan hasil pembangunan Zona Integritas Menuju WBK secara mandiri;
- c. bahwa terhadap seluruh tahapan hasil evaluasi atas pembangunan Zona Integritas Menuju WBK secara mandiri juga telah melalui supervisi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Rapat Panel Final dan *Clearance*;
- d. bahwa hasil Rapat Panel Final dan *Clearance* tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK secara mandiri pada 60 (enam puluh) satuan kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*);
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1016/SEK/OT.01.1/5/2023 Hal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
11. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/23/PW.00/2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3354/SEK/PW1.1.1/XI/2023 tanggal 3 November 2023 Hal Evaluasi ZI Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2023;
13. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/202/PW.03/2023 tanggal 17 Nopember 2023 Hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Mahkamah Agung RI Tahun 2023;
14. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3739/SEK/PW1.1.1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 Hal Evaluasi ZI Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI PADA
60 (ENAM PULUH) SATUAN KERJA.

- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja sebagaimana terdapat dalam bagian Lampiran;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 4 Desember 2023

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MANDIRI TAHUN 2023

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
I	PERADILAN UMUM					
1	Pengadilan Tinggi Mataram	Pengungkit 46,40 Hasil 37,02 IPAK 3,94 IPKP 3,95 Nilai Total 83,42	Memenuhi Kriteria WBK	1. Unit kerja telah mengidentifikasi dan memitigasi berbagai macam potensi risiko yang dimiliki dengan membangun berbagai macam sistem pengawasan di lingkungan unit kerja namun identifikasi terhadap risiko integritas perlu terpetakan dengan baik (detil) dalam rangka mengurangi berbagai macam potensi penyimpangan yang berdampak pada penegakan integritas. 2. Inovasi yang ada terkait integritas : a. " Pembacaan Putusan perkara secara Live Streaming " lengkap dengan dasar pertimbangan hukum b. Sepakat (Penyempahan Advokat disertai Pembekalan dan Pembinaan oleh KPT dan unsur pimpinan terkait integritas, kode etik hakim dll) 3. Komitmen yang baik dari pimpinan maupun anggota pada unit kerja agar tetap konsisten dijalankan secara berkelanjutan dalam pembangunan birokrasi yang efektif 4. Telah dilakukan kerjasama dengan stakeholder terkait namun bukan terkait meningkatkan capaian kinerja; (MOU dengan 7 Universitas) namun hanya terkait Pembekalan Mahasiswa yang magang di PT Mataram	a) Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. b) perlu diinformasikan secara detil pada website terhadap inovasi pembacaan putusan secara live streaming dan SEPAKAT dikatakan sebagai inovasi integritas. c. Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik,	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
2	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengungkit 48,74 Hasil 38,71 IPAK 4,00 IPKP 3,99 Nilai Total 87,45	Memenuhi Kriteria WBK	1) Implementasi SPBE mendorong pelaksanaan pelayanan pada PT Pekanbaru yang lebih berkualitas efektif, efisien dan transparan 2) Komitmen yang baik dari pimpinan maupun anggota pada unit kerja dijalankan secara berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang efektif 3) Unit Pengendali Gratifikasi telah dibentuk dan terdapat lemari gratifikasi 4) Terdapat "Kantin Merah Putih" yang dilengkapi dengan pemantauan CCTV dan pembatasan akses bagi pengunjung. Nama Merah Putih merupakan representasi Gedung KPK Merah Putih	1. Meningkatkan kualitas implementasi SPBE yang terintegrasi di semua peradilan di wilayah hukum PT Pekanbaru sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan yang lebih efektif, efisien dan transparan; 2. Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait untuk menumbuhkan peran aktif seluruh pegawai dalam mendorong keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK; 3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP.	WBK
3	Pengadilan Tinggi Pontianak	Pengungkit 51,88 Hasil 37,37 IPAK 3,98 IPKP 3,99 Nilai Total 89,25	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja sudah mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalnya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja; c) Unit kerja yang diusulkan sudah memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.	a) Mengoptimalkan internalisasi pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b) Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c) Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pengungkit 51,78 Hasil 39,96 IPAK 4,00 IPKP 3,99 Nilai Total 91,74	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Telah dilakukan inovasi untuk meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat seperti: PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ONLINE DAN POSBAKUM ONLINE</p> <p>Aplikasi ini melayani komunikasi melalui pesan teks (chat) dan video menggunakan zoom meeting serta permohonan layanan melalui https://ptsponline.pn-bangkinang.go.id/ SUPERDATA (Surat Permohonan Perkara Perdata) Inovasi yang menyediakan template Permohonan Dan Gugatan Mandiri secara online (https://superdata.pn-bangkinang.go.id/)</p> <p>- Telah dilakukan inovasi untuk meningkatkan integritas dalam administrasi dan pelaksanaan persidangan seperti: SIPANJAR (Aplikasi Sistem Informasi Sisa Panjar) Sistem informasi yang memberikan transparansi informasi terkait pengembalian sisa panjar perkara pada Pengadilan Negeri Bangkinang (https://sipanjar.pn-bangkinang.go.id/) PRO-SIDANG (Aplikasi PROTOKOLER PERSIDANGAN) Untuk Mendapatkan Pemberitahuan Jadwal Persidangan Pidana dan Perdata pada hari ini dan satu hari sebelum sidang Secara Otomatis dan Notifikasi/ Pemberitahuan melalui WhatsApp (WA) Jika salah satu pihak telah mengambil nomor antrian Persidangan, para pihak dapat mendaftarkan Nomor Telepon yang Aktif dan Bisa WhatsApp (WA) pada saat Mengambil Nomor Antrian Persidangan di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. (http://103.248.199.122:8845/prosidang/)</p>	<p>- Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien;</p> <p>- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;</p> <p>- Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP.</p>	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
5	Pengadilan Negeri Negara	Pengungkit 49,71 Hasil 37,37 IPAK 3,99 IPKP 3,98 Nilai Total 87,08	Memenuhi Kriteria WBK	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI telah dilakukan; - implementasi SPBE telah terintegrasi; - unit kerja telah memahami definisi maupun target kinerjanya; - unit kerja telah mengimplementasikan mitigasi risiko dalam penegakan integritas melalui pengembangan inovasi aplikasi eDasa, BASKARA dan SIM SKUM; - inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan evaluasi objektivitas output dan outcome berbagai upaya perubahan yang telah dilakukan secara berkala, sehingga menjadi umpan balik unit kerja dalam mengambil strategi perbaikan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian kinerja - Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien - Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang untuk membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik; - Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja 	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
6	Pengadilan Negeri Selong	Pengungkit 44,93 Hasil 38,75 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 83,68	Memenuhi Kriteria WBK	1. Implementasi SPBE sudah terintegrasi sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien 2. Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan sekaligus sebagai layanan integritas adalah e-PTSP, Peta Digital, Kehadiran dan panggilan sidang, antrian PTSP, statistik kepaniteraan digital . bentuk Pengendalian yang telah dilakukan (mitigasi risiko yang telah dilakukan): - internalisasi terhadap integritas (yang selalu disampaikan pimpinan dalam setiap apel senin pagi dan rapat bulanan) - public campaign No Gratifikasi stopKorupsi yang terpampang di berbagai titik (hal ini terlihat dari Banner yang terpampang mulai dari pintu gerbang masuk, Taman, ruang Tunggu sidang, kantin, ruangan PTSP dan stiker yg terpasang pada setiap pintu ruang sidang, ruang kerja Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera	1. Menjaga kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien 2. Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja, khususnya Inovasi terkait integritas 3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK
7	Pengadilan Negeri Pasarwajo	Pengungkit 50,98 Hasil 36,99 IPAK 4,00 IPKP 3,88 Nilai Total 87,97	Memenuhi Kriteria WBK Namun Tidak Lulus Clearance	1). Pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen atas penerapan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegritas 2). Unit kerja telah mengupayakan program memperluas jangkauan layanan melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah untuk memberikan layanan pengadilan melalui Mall Layanan dengan dukungan penuh Pemerintah daerah di wilayah hukum unit kerja Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja : Jo K'ren (Pojok Kelompok Rentan), D'Satria (Digitalisasi Pendaftaran Akun E-Court non Advocat bagi kelompok rentan); Inovasi atas layanan melalui kerjasama Pemda di wilayah hukum untuk Menyediakan layanan Peradilan di Mall Pelayanan yang telah berjalan di 2 Kabupaten dengan personil dari Pemda	- Mengoptimalkan jangkauan layanan yang menjangkau semua wilayah hukum unit kerja; - Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
8	Pengadilan Tinggi Kupang	Pengungkit 45,29 Hasil 37,24 IPAK 3,98 IPKP 3,96 Nilai Total 82,53	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus Verifikasi Lapangan	Unit kerja telah berupaya dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai macam potensi risiko yang dimiliki dengan membangun berbagai macam sistem pengawasan di lingkungan unit kerja. namun unit kerja belum sepenuhnya melakukan Monev terkait efektivitas sistem pengawasan yang telah dimiliki maupun peta risiko yang telah disusun dalam mencegah berbagai macam risiko di unit kerja sehingga sistem pengawasan maupun peta risiko yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dipastikan mampu meminimalisir seluruh potensi risiko di unit kerja yang kemudian berdampak pada kurang optimalnya pengurangan berbagai macam potensi penyimpangan yang berdampak pada penegakan integritas	Mendorong peningkatan implementasi kebijakan pengawasan internal, yaitu pengendalian gratifikasi, WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, dan SPIP.	-
9	Pengadilan Tinggi Palembang	Pengungkit 50,75 Hasil 37,46 IPAK 3,99 IPKP 4,00 Nilai Total 88,21	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus Verifikasi Lapangan	- implementasi SPBE belum terintegrasi; - unit kerja belum mengimplementasikan mitigasi risiko dalam penegakan integritas dikarenakan inovasi aplikasi e_ADVOKAT belum di implementasikan; - inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan belum secara optimal dilakukan oleh unit kerja (sosialisasi ke pihak pengguna layanan) - Monitoring dan evaluasi atas inovasi belum dilakukan secara optimal;	- Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja - Melakukan sosialisasi kepada stakeholder/pengguna layanan atas inovasi yang ada sehingga dapat diketahui dan manfaat atas inovasi tersebut dapat dirasakan dan memberikan kemudahn bagi stakeholder/pengguna layanan - Melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi sehingga dapat menjadi bahan koreksi dan perbaikan serta pengembangan inovasi kedepan.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
10	Pengadilan Tinggi Banten	Pengungkit 43,83 Hasil 36,03 IPAK 4,00 IPKP 3,95 Nilai Total 79,86	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Wawancara)	Area 1 : Belum terdapat Penetapan Target Prioritas Tahun 2023, dokumen laporan hasil monev di area 1 tidak memadai Area 4 : Terdapat IKU Persentase penyelesaian perkara melalui RJ, Indikator kinerja belum disesuaikan dengan SK Sekma Nomor 173 Tahun 2022, sehingga terdapat potensi Penjenjangan Kinerja belum mengacu pada kinerja utama organisasi Area 5 : Belum terinternalisasi dengan baik terkait mekanisme pengendalian gratifikasi di PT Banten Area 6 : Inovasi bukan hal yang baru (Penyempuhan advokat)	- Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas; - Melakukan reuiu IKU dan diselenggarakan dengan Kebijakan Penetapan IKU secara Nasional; - Mendorong peningkatan implementasi kebijakan pengawasan internal, yaitu pengendalian gratifikasi, WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, dan SPIP; - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja.	-
11	Pengadilan Negeri Banjarmasin	Pengungkit 42,11 Hasil 37,50 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 79,61	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
12	Pengadilan Negeri Batang	Pengungkit 49,06 Hasil 36,58 IPAK 3,84 IPKP 3,95 Nilai Total 85,64	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
13	Pengadilan Negeri Stabat	Pengungkit 46,66 Hasil 36,25 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 82,91	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
14	Pengadilan Negeri Subang	Pengungkit 47,77 Hasil 36,17 IPAK 3,99 IPKP 3,99 Nilai Total 83,94	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
II	PERADILAN AGAMA					
15	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Pengungkit 51,98 Hasil 38,27 IPAK 3,96 IPKP 3,93 Nilai Total 90,25	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Inovasi-inovasi telah diterapkan. Dengan adanya inovasi kebijakan Propperading, tidak ada perkara yang diputus di atas 30 hari. Inovasi e-Waskita sudah diterapkan pada pengawasan yang dilakukan 2 kali setahun yaitu pada bulan Juli 2023 (sudah dilaksanakan) dan November 2023. Namun, belum ada fitur untuk memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan.</p> <p>- Secara umum, kampanye anti korupsi (gratifikasi dan suap dll) telah dilaksanakan melalui pemasangan banner/spanduk dan informasi yang dipublikasikan pada website serta media sosial.</p>	<p>- Memaksimalkan hasil pengawasan atas kinerja satuan kerja dilingkungan PTA Palembang melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil rekomendasi pengawasan yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa telah ada perbaikan menyeluruh sesuai dengan hasil rekomendasi.</p> <p>- Terus menerus memastikan program anti korupsi berjalan melalui kampanye kepada masyarakat dan sosialisasi baik kepada internal maupun eksternal sehingga terwujud hal-hal yang positif dari masyarakat kepada pelayanan yang diberikan oleh PTA Palembang.</p>	WBK
16	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	Pengungkit 51,59 Hasil 37,24 IPAK 3,99 IPKP 3,95 Nilai Total 88,83	Memenuhi Kriteria WBK	<p>a) Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi pada unit kerja dengan pemahaman yang cukup memadai dari pimpinan maupun anggota unit kerja tentang bagaimana menerapkan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegrasi.</p> <p>b) Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja;</p> <p>c) Unit kerja yang diusulkan sudah memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.</p>	<p>a) Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait untuk menumbuhkan peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI;</p> <p>b) Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja;</p> <p>c) Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.</p>	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
17	Pengadilan Agama Bantul	Pengungkit 49,45 Hasil 36,61 IPAK 3,81 IPKP 3,70 Nilai Total 86,06	Memenuhi Kriteria WBK	a)Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi pada unit kerja dengan pemahaman yang cukup memadai dari pimpinan maupun anggota unit kerja tentang bagaimana menerapkan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegrasi; b)Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja.	a)Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait untuk menumbuhkan peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI; b)Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja.	WBK
18	Pengadilan Agama Batu Sangkar	Pengungkit 50,61 Hasil 38,53 IPAK 3,98 IPKP 3,97 Nilai Total 89,14	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi sudah dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat/pihak berperkara melalui program kegiatan baik di dalam kantor maupun di luar kantor dengan melakukan sidang keliling dan PTSP keliling serta pengantaran produk layanan ke masyarakat. Selain itu sudah dibangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu Wali Nagari, Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan (untuk dispensasi nikah), Kementerian Agama (KUA), PT Pos, Dinas Sosial (perlindungan anak dan perempuan), perguruan tinggi (UIN); c) Unit kerja yang diusulkan sudah mengupayakan pencegahan terhadap praktek pungli, gratifikasi melalui informasi dan himbauan yang ditampilkan pada banner, website, dan media sosial. Selain itu pada surat tercatat dan relaas yang disampaikan oleh jurusita kepada pihak sudah menginformasikan himbauan pencegahan; d. Unit kerja yang diusulkan sudah cukup memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja (program coffe morning yang diadakan setiap jumat).	a Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c Meningkatkan program pencegahan korupsi melalui berbagai sarana dan kerjasama yang sinergi dengan instansi lain (stakeholder). d Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
19	Pengadilan Agama Bojonegoro	Pengungkit 49,06 Hasil 35,44 IPAK 3,77 IPKP 3,76 Nilai Total 84,50	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada setiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari;</p> <p>- Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan eksternal dan internal telah dilakukan oleh unit kerja</p>	<p>- Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan zi secara menyeluruh, tidak hanya di tim kelompok kerja (Pokja) atau petugas layanan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI</p> <p>- Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja</p>	WBK
20	Pengadilan Agama Cilegon	Pengungkit 51,80 Hasil 37,07 IPAK 3,96 IPKP 3,94 Nilai Total 88,87	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen atas penerapan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegritas.</p> <p>- Inovasi yang memberikan kemudahan dan kualitas layanan untuk meningkatkan integritas telah dilakukan oleh unit kerja yaitu mobile PAC (One touch service PA Cilegon) yang dapat diakses pada https://mobile.pa-cilegon.go.id/ yang berisi berbagai layanan diantaranya prosedur perkara, PTSP online, antrian online, booking produk PA, kalkulator panjar, pendaftaran online, jadwal sidang, live streaming antrian PTSP & sidang, gugatan mandiri, validasi produk PA, tracking surat tercatat yang telah terintegrasi dengan data base PT Pos, cek Perkara realtime, survei persepsi dan pengaduan online). Unit kerja juga telah menerapkan Sistem Cashless untuk semua pembayaran seperti pengambilan sisa panjar, pembayaran PNBPN dan Panjar Biaya Perkara dilakukan melalui loket Bank sehingga menjadi transparan dan akuntabel.</p> <p>- Telah melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pencapaian kinerja diantaranya Pemkot Cilegon dengan Menyediakan layanan Peradilan di Mal Pelayanan Publik setiap hari selasa dan jumat dan public campaign melalui videotron.</p>	<p>- Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Cilegon dan pihak terkait dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI.</p> <p>- Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien.</p> <p>- Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.</p> <p>- Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan</p>	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
21	Pengadilan Agama Cirebon	Pengungkit 47,61 Hasil 37,02 IPAK 3,96 IPKP 3,93 Nilai Total 84,63	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja.	a)Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b)Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja.	WBK
22	Pengadilan Agama Dumai	Pengungkit 48,85 Hasil 37,50 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 86,35	Memenuhi Kriteria WBK	- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; - Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja, seperti SIANDIL, SIDASI, SINOLA, SI-PERSIK, dan SI-PETAS; - Pengawasan internal sudah dilaksanakan dengan cukup memadai.	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP	WBK
23	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pengungkit 53,43 Hasil 38,66 IPAK 4,00 IPKP 3,98 Nilai Total 92,09	Memenuhi Kriteria WBK	- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada setiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; - Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan eksternal dan internal telah dilakukan oleh unit kerja	- Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan zi secara menyeluruh, tidak hanya di tim kelompok kerja (Pokja) atau petugas layanan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
24	Pengadilan Agama Lasusua	Pengungkit 51,66 Hasil 37,11 IPAK 3,99 IPKP 3,92 Nilai Total 88,77	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada setiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari;</p> <p>- Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan eksternal dan internal telah dilakukan oleh unit kerja</p>	<p>- Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan zi secara menyeluruh, tidak hanya di tim kelompok kerja (Pokja) atau petugas layanan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI</p> <p>- Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja</p>	WBK
25	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	Pengungkit 50,25 Hasil 34,35 IPAK 3,62 IPKP 3,66 Nilai Total 84,60	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pembangunan ZI sudah terinternalisasi dengan baik, terutama dalam hal komitmen, pemahaman pimpinan dan pegawai unit kerja, sebagai upaya memberikan layanan yang berintegritas.</p> <p>- Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja seperti : QR Code pada Akta Cerai, Teman Pakam (Tempat Pendaftaran dan Pengambilan Akta Cerai Bersama di Kantor Kepala Desa yang berjarak lebih kurang 15 Km dari kantor PA Lubuk Pakam), Tekan Bel (Transportasi Kemudahan untuk Lanjut Usia dan Difabel), Antrian Sidang Terpadu (Aplikasi untuk mengambil nomor antrian sidang secara elektronik untuk layanan PTSP dan persidangan). Inovasi yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan dimonitoring secara berkala.</p> <p>- Secara umum, kampanye anti gratifikasi telah dilaksanakan diantaranya dengan pembentukan tim UPG, audio gratifikasi yang diputar setiap 2 jam sekali, CCTV, area steril dan banner banner anti gratifikasi di website, media sosial dan di area kantor PA Lubuk Pakam.</p>	<p>- Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan pihak terkait dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI.</p> <p>- Mengembangkan inovasi yang unggul dan berkelanjutan serta secara efektif untuk meningkatkan pencapaian kinerja serta kualitas layanan. Inovasi yang berbasis IT agar sepenuhnya terintegrasi dan saling terhubung secara otomatis satu sama lain.</p> <p>- Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.</p>	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
26	Pengadilan Agama Mempawah	Pengungkit 48,74 Hasil 36,40 IPAK 3,90 IPKP 3,85 Nilai Total 85,14	Memenuhi Kriteria WBK	a) Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi pada unit kerja dengan pemahaman yang cukup memadai dari pimpinan maupun anggota unit kerja tentang bagaimana menerapkan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegrasi; b) Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja; c) Unit kerja yang diusulkan sudah memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.	a) Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait untuk menumbuhkan peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI; b) Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja. c) Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
27	Pengadilan Agama Muara Bulian	Pengungkit 48,69 Hasil 37,50 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 86,19	Memenuhi Kriteria WBK	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI telah dilakukan; - implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi; - unit kerja telah memahami definisi maupun target kinerjanya; - unit kerja telah mengimplementasikan mitigasi risiko terutama tekiat penegakan integritas melalui Pernyataan Pakta Integritas oleh Para Pihak yang berperkara, Footnote Relas Panggilan dan Cap Buku Nikah; - Hasil Survei telah ditindaklanjuti antara lain adanya perbaikan ruang tunggu sidang yang merupakan masukan dari masyarakat melalui pengisian survei. - inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan evaluasi objektivitas output dan outcome berbagai upaya perubahan yang telah dilakukan secara berkala, sehingga menjadi umpan balik unit kerja dalam mengambil strategi perbaikan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian kinerja; - Mendorong implementasi SPBE terintegrasi sehingga dapat mempercepat pelayanan publik yang lebih efisien; - Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang untuk membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik; - Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan; - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja. 	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
28	Pengadilan Agama Muara Teweh	Pengungkit 51,70 Hasil 37,96 IPAK 3,93 IPKP 3,89 Nilai Total 89,66	Memenuhi Kriteria WBK	- Telah dilakukan pengujian dan berjalan baik, dan telah menampilkan data rekaman pengguna, seperti: inovasi wisma prodeo, absensi PPNPN - Telah ada data pengguna, dan pengguna merasa terbantu dengan adanya inovasi-inovasi yang ada, dari segi kemudahan layanan, keterjangkauan wilayah yang merupakan PA memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas. Namun masih terdapat hal yang perlu perbaikan berupa: data alamat pengguna layanan atas inovasi wisma prodeo - Capaian kinerja sudah baik, khususnya penyelesaian perkara tepat waktu. Namun atas perkara yang melewati waktu sesuai ketentuan belum dijelaskan dalam laporan LKJIP - Laporan tindak lanjut atas hasil SPAK agar dilaporkan dengan baik. Namun, dalam laporan SPAK Triwulan IV 2022 yang ditindaklanjuti dengan pembuatan inovasi PTSP Keliling yang dilatarbelakangi adanya praktek percaloan dari hasil survey belum dilaporkan	- agar inovasi wisma prodeo dibuatkan mekanisme yang jelas dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, serta mekanisme tersebut hendaknya dipublikasikan; - agar hal-hal yang perlu penjelasan seperti adanya penyelesaian perkara yang melewati waktu lima bulan meskipun hanya 1 perkara, untuk tetap dijelaskan pada laporan LKJIP, bahwa hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan; - Hasil survey yang membutuhkan tindak lanjut agar dimuat dalam laporan, dan atas tindak lanjut tersebut hendaknya dibuatkan laporan dan diadministrasikan sesuai tata naskah	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
29	Pengadilan Agama Padang Panjang	Pengungkit 48,26 Hasil 38,66 IPAK 4,00 IPKP 3,98 Nilai Total 86,92	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi sudah dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat/pihak berperkara melalui program kegiatan baik di dalam kantor maupun di luar kantor dengan melakukan sidang keliling dan PTSP keliling serta pengantaran produk layanan ke masyarakat. Selain itu sudah dibangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu Wali Nagari, Dukcapil Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan (untuk dispensasi nikah), PT Pos; c) Unit kerja yang diusulkan sudah mengupayakan pencegahan terhadap praktek pungli, gratifikasi melalui informasi dan himbauan yang ditampilkan pada banner, website, dan media sosial. Selain itu pada surat tercatat dan relaas yang disampaikan oleh jurusita kepada pihak sudah menginformasikan himbauan pencegahan. d. Unit kerja yang diusulkan sudah cukup memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.	a Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c Meningkatkan program pencegahan korupsi melalui berbagai sarana dan kerjasama yang sinergi dengan instansi lain (stakeholder). d Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK
30	Pengadilan Agama Pelaihari	Pengungkit 53,66 Hasil 36,67 IPAK 3,91 IPKP 3,90 Nilai Total 90,33	Memenuhi Kriteria WBK	- Uji penerapan inovasi berjalan baik. Inovasi umumnya berupa MOU dengan pihak ketiga baik dari pemda, baznas, dll. - Belum ada inovasi yang berbasis TI, sehingga belum ada manual book, yang ada buku penjelasan tentang inovasi yang terdaftar. - Data pengguna layanan inovasi baru sebatas jumlah pengguna, tidak ada rekaman data pengguna yang berupa identitas pengguna, layanan atas inovasi yang digunakan. - Layak nikah berhasil menurunkan tingkat pernikahan dini dari 188 di tahun 2021 menjadi 133 di 2022 dan tahun 2023 belum sampai 50an. - Ruang tunggu sidang menyatu dengan ruang tunggu pelayanan PTSP, karena prototipe bangunan lama yang telah direnovasi.	- agar inovasi UBIKARA dan LAYAK KAWIN dikembangkan dapat melalui teknologi informasi; - agar pencatatan atau perekaman data pengguna layanan diadministrasikan dengan baik, guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik; - agar ketersediaan layanan tetap dipertahankan ketersediaannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna layanan	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
31	Pengadilan Agama Poso	Pengungkit 48,52 Hasil 36,85 IPAK 3,96 IPKP 3,89 Nilai Total 85,37	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada setiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari;</p> <p>- Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan eksternal dan internal telah dilakukan oleh unit kerja (baik inovasi yang dioperasikan secara manual maupun TI). pelayanan kepada masyarakat sudah terintegrasi kedalam aplikasi pendukung yang disediakan pada website PA Poso.</p>	<p>- Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan zi secara menyeluruh, tidak hanya di tim kelompok kerja (Pokja) atau petugas layanan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI</p> <p>- Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja</p>	WBK
32	Pengadilan Agama Probolinggo	Pengungkit 48,17 Hasil 37,07 IPAK 3,94 IPKP 3,96 Nilai Total 85,24	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada setiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari;</p> <p>- Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan eksternal dan internal telah dilakukan oleh unit kerja</p>	<p>- Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan zi secara menyeluruh, tidak hanya di tim kelompok kerja (Pokja) atau petugas layanan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI</p> <p>- Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja</p>	WBK
33	Pengadilan Agama Salatiga	Pengungkit 53,40 Hasil 37,11 IPAK 3,96 IPKP 3,95 Nilai Total 90,51	Memenuhi Kriteria WBK	<p>a)Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi pada unit kerja dengan pemahaman yang cukup memadai dari pimpinan maupun anggota unit kerja tentang bagaimana menerapkan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegrasi;</p> <p>b)Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja.</p>	<p>a)Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait untuk menumbuhkan peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI;</p> <p>b)Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja.</p>	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
34	Pengadilan Agama Sambas	Pengungkit 55,88 Hasil 38,01 IPAK 3,88 IPKP 3,95 Nilai Total 93,89	Memenuhi Kriteria WBK	a)Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b)Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja; c)Unit kerja yang diusulkan sudah memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.	a)Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b)Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c)Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK
35	Pengadilan Agama Sengkang	Pengungkit 52,54 Hasil 35,75 IPAK 3,82 IPKP 3,78 Nilai Total 88,29	Memenuhi Kriteria WBK	- Terdapat komitmen bersama yang menampilkan foto dan tandatangan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Sengkang; - Terdapat Duta layanan yang menyambut pengunjung, selain itu terdapat pojok baca bagi pengunjung yang menunggu antrian; - Terdapat penghitung waktu pada masing-masing petugas pelayanan untuk memastikan bahwa pelayanan oleh petugas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP.	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
36	Pengadilan Agama Singaraja	Pengungkit 54,30 Hasil 37,15 IPAK 3,99 IPKP 3,93 Nilai Total 91,45	Memenuhi Kriteria WBK	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI telah dilakukan; - implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi; - unit kerja telah memahami definisi maupun target kinerjanya; - unit kerja telah mengimplementasikan mitigasi risiko dalam penegakan integritas melalui pengembangan inovasi Penanganan Pengaduan atas Layanan secara online (LIPO) dan Transaksi Non Tunai (TNT), dan Sistem Tanpa Calo (SITANCA); - inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan evaluasi objektivitas output dan outcome berbagai upaya perubahan yang telah dilakukan secara berkala, sehingga menjadi umpan balik unit kerja dalam mengambil strategi perbaikan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian kinerja - Mendorong implementasi SPBE terintegrasi sehingga dapat mempercepat pelayanan publik yang lebih efisien; - Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang untuk membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik; - Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja 	WBK
37	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	Pengungkit 52,21 Hasil 38,53 IPAK 3,97 IPKP 3,98 Nilai Total 90,74	Memenuhi Kriteria WBK	<ul style="list-style-type: none"> a)Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi pada unit kerja dengan pemahaman yang cukup memadai dari pimpinan maupun anggota unit kerja tentang bagaimana menerapkan pembangunan ZI sebagai upaya memberikan layanan yang berintegrasi. b)Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a)Mengembangkan internalisasi ZI yang efektif secara berkelanjutan kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait untuk menumbuhkan peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga konsistensi keberhasilan pembangunan ZI; b)Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja. 	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
38	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	Pengungkit 51,05 Hasil 37,48 IPAK 3,87 IPKP 3,84 Nilai Total 88,53	Memenuhi Kriteria WBK	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI telah dilakukan; - implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi, hanya terhimpun pada Website Resmi Pengadilan; - unit kerja telah memahami definisi maupun target kinerjanya; - unit kerja telah mengimplementasikan mitigasi risiko terutama tekiat penegakan integritas melalui Inovasi KOTEKA SAYA, DISKON; dan GARASI; - inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan evaluasi objektivitas output dan outcome berbagai upaya perubahan yang telah dilakukan secara berkala, sehingga menjadi umpan balik unit kerja dalam mengambil strategi perbaikan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian kinerja - Mendorong implementasi SPBE terintegrasi sehingga dapat mempercepat pelayanan publik yang lebih efisien - Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk pencapaian kinerja yang lebih baik - Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja 	WBK

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
39	Pengadilan Agama Kotabumi	Pengungkit 44,28 Hasil 38,45 IPAK 3,97 IPKP 3,96 Nilai Total 82,73	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus Verifikasi Lapangan	<p>a. Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan eksternal dan internal telah dilakukan oleh unit kerja, namun belum maksimal</p> <p>- Inovasi Tapis Berseri (aplikasi tracking surat tercatat yang telah terintegrasi dengan data base pos dan SIPP) dapat diterapkan dan sudah direplikasi oleh pengadilan agama di Wilayah PTA Lampung</p> <p>- Inovasi Payan Mas (berisi berbagai layanan, antara lain Pembuatan Gugatan Mandiri, Jadwal Sidang, Penghitungan Panjar Biaya Perkara, Layana E-Court, serta sarana Chat Online) awalnya berbasis aplikasi WhatsApp, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi android. Namun, saat dilakukan verlap aplikasi tidak dibuka karena sedang masa transisi dari apk ke playstore</p> <p>- SMS broadcasts imbauan anti gratifikasi yang dikirim secara random kepada masyarakat yang memasuki radius 300m dari PA Kotabumi. Namun karena berbayar, pengiriman SMS tidak menentu. Broadcasts terakhir 9 Juni 2022 dan baru di-broadcasts kembali setelah dilakukan verlap.</p> <p>b. Kampanye pembangunan Zona Integritas, anti gratifikasi, dan anti pungli belum dilakukan secara masif melalui banner/poster/pamflet</p>	<p>a. Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja;</p> <p>b. Meningkatkan program pencegahan korupsi melalui pemasangan banner/poster/pamflet di berbagai area pelayanan PA Kotabumi untuk mengkampanyekan pembangunan ZI, anti gratifikasi, anti pungli ke masyarakat</p>	-
40	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Pengungkit 46,31 Hasil 36,76 IPAK 3,96 IPKP 3,87 Nilai Total 83,07	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus Verifikasi Lapangan	<p>- Inovasi digunakan telah diterapkan oleh PA Kuala Kapuas.</p> <p>- Belum ada publikasi Maklumat Layanan Informasi Publik sebagaimana amanat SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada website Pengadilan Agama Kuala Kapuas.</p> <p>- Telah mencatat data pengguna inovasi berupa identitas pengguna dan layanan yang digunakan, beserta nomor kontak, dan terkonfirmasi dengan baik. Namun, ada yang perlu diperbaiki berupa belum mencatat tanggal transaksi untuk inovasi penda ketapi.</p> <p>- Terbantu dengan adanya penggunaan aplikasi tersebut, keterjangkauan waktu dan jangkauan jarak yang tidak perlu ke kantor PA, dan diupayakan pengembangan seperti penda ketapi untuk diperluas agar bisa langsung terupdate status pernikahan untuk perkara perceraian.</p> <p>- Inovasi unggulan belum menjawab penguatan integritas</p>	<p>- Inovasi penda ketapi terus dikembangkan penggunaannya ke satker lain di lingkungan peradilan</p> <p>- Segera mempublikasikan Maklumat Layanan Informasi Publik sebagaimana amanat SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada website Pengadilan Agama Kuala Kapuas.</p> <p>- Fitur tampilan inovasi dan database perekaman data terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan</p> <p>- Membangun inovasi untuk memitigasi risiko terkait penguatan integritas dalam pelayanan peradilan</p>	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
41	Pengadilan Agama Kupang	Pengungkit 42,42 Hasil 37,29 IPAK 3,99 IPKP 3,96 Nilai Total 79,71	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Wawancara)	Area 1: Target prioritas belum ditetapkan, tidak ada penjelasan implementasi core value ASN Ber-AKHLAK, data dukung monev berkala tidak memadai Area 4: data dukung capaian kinerja berbeda dengan informasi yang ada di komdanas berupa target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Area 5: Pengendalian gratifikasi belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung sehingga tidak dapat diyakini pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	- Menetapkan Target prioritas Zona Integritas - Peningkatan Internalisasi dan implementasi core value ASN Ber-AKHLAK - Melakukan Monev ZI dilakukan berkala - Meningkatkan implemetasi penanganan gratifikasi	-
42	Pengadilan Agama Merauke	Pengungkit 44,35 Hasil 36,97 IPAK 3,95 IPKP 3,93 Nilai Total 81,32	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Wawancara)	Area 1 : Penjelasan belum menggambarkan adanya penetapan target prioritas Area 5 : Penjelasan atas penanganan gratifikasi kurang memadai serta Pengendalian gratifikasi belum mempedomani Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 Area 6 : Penjelasan atas penanganan pengaduan tidak memadai, Masih terdapat pengaduan pelayanan dalam google review belum sepenuhnya direspon. Terdapat inovasi di luar jam dan hari kerja yaitu SI LAKHSA yang merupakan Inovasi Pengadilan Agama Merauke yang memberikan layanan setiap hari Sabtu pada pukul 08.00 s.d 12.00 khusus pengambilan produk pengadilan berupa akta cerai, salinan putusan, dan salinan penetapan. SK pemberlakuan per 02 Juni 2023. Data Pengguna 2 orang s/d Juli 2023.	- Menetapkan Target prioritas Zona Integritas - Meningkatkan Implemetasi penanganan gratifikasi - Melakukan tindaklanjut atas pengaduan layanan di berbagai kanal	-
43	Pengadilan Agama Stabat	Pengungkit 45,06 Hasil 38,68 IPAK 3,99 IPKP 3,99 Nilai Total 83,74	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Wawancara)	Area 1 : Target prioritas belum ditetapkan, data dukung monev tidak memadai Area 4 : Capaian Kinerja Bulanan pada Komdanas untuk Tahun 2023 sejak Januari sampai dengan Juni 2023 belum diisi Area 5 : Pengendalian gratifikasi belum mempedomani Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 dan penjelasan terkait pengendalian risiko kurang memadai	- Menetapkan Target prioritas Zona Integritas - Melakukan Monev atas capain kinerja secara berkala - Melakukan tindaklanjut atas pengaduan layanan di berbagai kanal	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
44	Pengadilan Agama Suwawa	Pengungkit 48,53 Hasil 36,25 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 84,78	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Wawancara)	Area 4 : Monev untuk Capaian Kinerja belum optimal, Berdasarkan penjelasan PA Suwawa, Pencatatan Data Permohonan Eksekusi dicatat Nol meskipun terdapat permohonan perkara dengan Perkara Nomor : 398/Pdt.G/2022/PA.Sww karena pada tahun 2022 Eksekusi belum selesai. Sasaran strategis kinerja 3 tidak mencapai target Area 6 : Problem/Need Inovasi tidak korelasi dengan pemanfaatan aplikasinya. PA Suwawa membangun inovasi SILACU dan sampai saat ini baik SILACU maupun SIWAS belum ada yang menyampaikan pengaduan	Melakukan Monev untuk secara berkala agar capaian Kinerja lebih optimal Membuat inovasi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan integritas, kinerja dan pelayanan publik	-
45	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Pengungkit 51,82 Hasil 0,00 IPAK 0,00 IPKP 0,00 Nilai Total 51,82	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
46	Pengadilan Agama Arga Makmur	Pengungkit 49,76 Hasil 0,00 IPAK 0,00 IPKP 0,00 Nilai Total 49,76	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
47	Pengadilan Agama Bengkulu	Pengungkit 52,23 Hasil 36,03 IPAK 3,97 IPKP 3,98 Nilai Total 88,26	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
48	Pengadilan Agama Giri Menang	Pengungkit 43,09 Hasil 37,07 IPAK 3,96 IPKP 3,94 Nilai Total 80,16	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
49	Pengadilan Agama Kisaran	Pengungkit 56,13 Hasil 34,90 IPAK 3,81 IPKP 3,88 Nilai Total 91,03	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
50	Pengadilan Agama Muara Enim	Pengungkit 52,45 Hasil 34,98 IPAK 3,87 IPKP 3,84 Nilai Total 87,43	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
51	Pengadilan Agama Simalungun	Pengungkit 49,00 Hasil 37,50 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 86,50	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-
52	Pengadilan Agama Tondano	Pengungkit 48,23 Hasil 36,03 IPAK 4,00 IPKP 3,95 Nilai Total 84,26	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
III	PERADILAN MILITER					
53	Pengadilan Militer II-09 Bandung	Pengungkit 47,32 Hasil 36,23 IPAK 3,85 IPKP 3,86 Nilai Total 83,55	Memenuhi Kriteria WBK	<p>- Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja sudah mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari</p> <p>- Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja, seperti AVIPMIL (Asisten Virtual PTSP Pengadilan Militer II-09 Bandung) aplikasi yang digunakan untuk pelayanan informasi dan pengaduan secara virtual melalui aplikasi WhatsApp, Aplikasi Apsid (Panggilan sidang), meja konsultasi hukum, fitur voice website, e-magang dan Podcast Dilan.</p> <p>- Dilmil II-09 Bandung telah melakukan public campaign secara berkala di website dan media sosial resmi, serta banner-banner yang ada di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung serta Audio Himbauan Tolak Gratifikasi yang diputar secara sistem.</p>	<p>- Mengoptimalkan internalisasi pembangunan zi yang sudah dilakukan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI.</p> <p>- Mengembangkan inovasi yang unggul dan berkelanjutan secara efektif untuk meningkatkan pencapaian kinerja serta kualitas layanan.</p> <p>- Meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.</p>	WBK
54	Pengadilan Militer I-03 Padang	Pengungkit 49,83 Hasil 36,25 IPAK 4,00 IPKP 4,00 Nilai Total 86,08	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
IV	PERADILAN TATA USAHA					
55	Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar	Pengungkit 46,52 Hasil 35,88 IPAK 3,79 IPKP 3,84 Nilai Total 82,40	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja, seperti SIPAKALEBBI, SIPAKAINGA, SIPAKATAU, dan SIPINTAR	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi dan penerapan SPIP.	WBK
56	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	Pengungkit 51,07 Hasil 37,70 IPAK 3,90 IPKP 3,86 Nilai Total 88,77	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja.	a)Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b)Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja.	WBK
57	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Pengungkit 51,18 Hasil 36,50 IPAK 3,99 IPKP 3,78 Nilai Total 87,68	Memenuhi Kriteria WBK Namun Tidak Lulus Clearance	Tidak lolos clearance Badan Pengawasan MA	Mendorong implementasi kebijakan pengawasan internal, yaitu pengendalian gratifikasi, WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, dan SPIP;	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
58	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Pengungkit 42,89 Hasil 35,58 IPAK 3,80 IPKP 3,76 Nilai Total 78,47	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Wawancara)	- Progres perubahan unit kerja menuju WBK belum signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa proses perubahan belum sepenuhnya terimplementasikan; - Manajemen kinerja pada unit kerja belum berjalan dengan efektif, karena unit kerja belum sepenuhnya memahami definisi maupun target kinerja serta belum melakukan pemantauan kinerja secara berkala; - Unit kerja telah berupaya dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai macam potensi risiko yang dimiliki dengan membangun berbagai macam sistem pengawasan di lingkungan unit kerja. namun sebagian unit kerja belum sepenuhnya melakukan Monev terkait efektivitas sistem pengawasan yang telah dimiliki maupun peta risiko yang telah disusun dalam mencegah berbagai macam risiko di unit kerja sehingga sistem pengawasan maupun peta risiko yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dipastikan mampu meminimalisir seluruh potensi risiko di unit kerja yang kemudian berdampak pada kurang optimalnya pengurangan berbagai macam potensi penyimpangan yang berdampak pada penegakan integritas; - Pengawasan internal sudah berjalan, namun terobosan untuk semakin mengurangi risiko penyimpangan integritas seluruh pegawai belum dikembangkan secara efektif dan berkelanjutan;	- Mengimplementasikan inovasi-inovasi, terutama aspek penguatan integritas; - Membudayakan <i>sharing vision</i> oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang sehingga implementasi manajemen kinerja menjadi lebih tepat dan fokus pada pencapaian target kinerja yang lebih baik; - Mendorong implementasi kebijakan pengawasan internal, yaitu pengendalian gratifikasi, WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, dan SPIP; - Mengembangkan terobosan dalam penguatan sistem pengawasan internal yang telah dilakukan dengan tindak lanjut konkret dan efektif untuk meminimalisir penyimpangan integritas unit kerja dan seluruh pegawai.	-
59	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Pengungkit 48,75 Hasil 36,15 IPAK 3,86 IPKP 3,83 Nilai Total 84,90	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
60	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	Pengungkit 51,11 Hasil 34,09 IPAK 3,67 IPKP 3,55 Nilai Total 85,20	Tidak Memenuhi Kriteria WBK (Tidak Lulus DE - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung)	Area 5 Reform Terdapat 1 bukti lapor LHKPN tidak dapat diyakini kebenarannya. Terdapat data dukung yang belum memadai untuk mendukung penilaian pada beberapa parameter sehingga tidak memenuhi kriteria minimal penilaian ZI menuju WBK Data dukung "Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah" tidak menjelaskan Pelayanan Penyelesaian perkara, pelayanan informasi, pelayanan pengaduan, service delivery	Agar informasi pada setiap penilaian sub komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diberikan penjelasan secara lengkap dan objektif dengan dilampiri Data Dukung yang valid, relevan dan memadai.	-

Pt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023

Tanggal: 4 Desember 2023

DAFTAR SATUAN KERJA MEMENUHI PREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

No	Unit Kerja
I	PERADILAN UMUM
1	Pengadilan Tinggi Mataram
2	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
3	Pengadilan Tinggi Pontianak
4	Pengadilan Negeri Bangkinang
5	Pengadilan Negeri Negara
6	Pengadilan Negeri Selong
II	PERADILAN AGAMA
1	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
3	Pengadilan Agama Bantul
4	Pengadilan Agama Batu Sangkar
5	Pengadilan Agama Bojonegoro
6	Pengadilan Agama Cilegon
7	Pengadilan Agama Cirebon
8	Pengadilan Agama Dumai
9	Pengadilan Agama Kabupaten Malang
10	Pengadilan Agama Lasusua
11	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
12	Pengadilan Agama Mempawah
13	Pengadilan Agama Muara Bulian
14	Pengadilan Agama Muara Teweh
15	Pengadilan Agama Padang Panjang
16	Pengadilan Agama Pelaihari
17	Pengadilan Agama Poso
18	Pengadilan Agama Probolinggo
19	Pengadilan Agama Salatiga

20	Pengadilan Agama Sambas
21	Pengadilan Agama Sengkang
22	Pengadilan Agama Singaraja
23	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
24	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
III PERADILAN MILITER	
1	Pengadilan Militer II-09 Bandung
IV PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO